

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik terkait wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, yang dalam Bahasa Inggris *Ministry of Gender Equality and Family* dan dalam Bahasa Korea 여성가족부 (Yeosong Gajok Bu), di Korea Selatan merupakan hasil interaksi antara tradisi patriarki yang kuat dan gerakan feminisme yang terus berkembang. Meskipun terdapat kemajuan dalam pemenuhan hak-hak perempuan, tantangan besar masih ada dalam bentuk reaksi konservatif yang berupaya mempertahankan norma-norma tradisional. Perdebatan ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat Korea Selatan saat ini, terutama karena nama kementerian ini dalam Bahasa Korea menggunakan istilah yang merujuk pada satu gender saja yaitu, 여성 (yeosong), yang berarti perempuan.

Hal ini mencerminkan ketegangan norma tradisional dan perubahan sosial yang sedang berlangsung, masyarakat Korea Selatan memiliki akar budaya patriarki yang dalam, dimana peran tradisional masih sangat dominan. Banyak generasi muda, terutama perempuan mulai menentang norma ini dan mendukung kesetaraan gender sebagai bagian dari perjuangan untuk hak-hak mereka. Wacana penghapusan kementerian ini dianggap sebagai langkah mundur bagi upaya tersebut (Costrani & Burhan).

Korea Selatan, sebagai salah satu negara di Asia Timur, menghadapi tantangan signifikan dalam memperlakukan perempuan, meskipun telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek. Korea Selatan menduduki peringkat 108 dari 146 negara dalam kesetaraan gender menurut laporan *World Economic Forum* Tahun 2023 (Fahira, 2024). Meskipun perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan, perempuan masih mengalami diskriminasi di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, perempuan di Korea Selatan mendapatkan upah rata-rata 36,7% lebih rendah dibandingkan laki-laki (Safitri, 2023).



Sejak tahun 1990-an, gerakan perempuan di Korea Selatan mulai berkembang dengan fokus pada isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, hak reproduksi, dan kesetaraan di tempat kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan feminisme di Korea Selatan telah mendapatkan momentum, dengan banyak perempuan muda yang aktif memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam politik tanpa diskriminasi. Pada tahun 2018, muncul gerakan 4B yang terdiri dari *Bi-hone* (tidak menikah), *Bi-childbirth* (tidak akan memiliki anak), *Bi-relationship* (tidak akan berpasangan), dan *Bi-seks* (tidak akan melakukan hubungan seksual untuk tujuan regenerasi). Istilah "Bi" berasal dari Bahasa Korea (비혼, 비출산, 비연애, 비섹스) yang memiliki arti "tidak" dalam Bahasa Indonesia. Gerakan ini menjadi salah satu inisiatif untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap norma patriarki serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat modern. Gerakan ini bertujuan untuk membebaskan perempuan dari keterikatan dengan laki-laki.

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga di Korea Selatan dibentuk untuk mengatasi dan menangani permasalahan yang berakar dari isu-isu sosial, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan. Salah satu permasalahan sosial yang menjadi tantangan bagi Korea Selatan saat ini adalah krisis demografi, di mana negara ini memiliki angka kelahiran terendah di dunia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya generasi muda yang merasa tertekan oleh biaya hidup yang tinggi serta kurangnya dukungan bagi keluarga. Dalam konteks ini, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dalam mengelola pekerjaan dan keluarga.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah juga menjadi masalah oleh generasi muda yang menganggap kebijakan pemerintah saat ini tidak cukup mendukung kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Wacana penghapusan kementerian ini dapat dilihat sebagai pengabaian terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi. Banyak aktivis dan organisasi perempuan menganggap langkah tersebut sebagai sinyal negatif yang menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah terhadap upaya perlindungan hak perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Upaya untuk mengah hal ini dan mendukung berbagai jenis permasalahan keluarga dan



jenis keluarga baru terbentuk supaya dapat bertahan sesuai dengan fungsinya sebagai mana mestinya, maka pada tahun 2005 Undang-Undang Organisasi Pemerintah direvisi dan ditata kembali menjadi Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (ESCAP, 2005).

Korea Selatan memiliki kekhasan dalam pembentukan kebijakan yang dipengaruhi oleh sejarah, geopolitik, dan dinamika internal. Pada saat Presiden ke 19 kebijakan di Korea Selatan cenderung lebih kooperatif dan humanis, sebaliknya kebijakan Presiden ke 20 lebih konservatif. Dinamika politik internal yang terjadi di Korea Selatan salah satunya perubahan kepemimpinan dan opini publik. Pemimpin baru sering membawa agenda baru yang dapat mengubah arah kebijakan. Tetapi Korea Selatan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan geopolitik untuk mempertahankan keseimbangan antara keamanan nasional dan diplomasi budaya yang merupakan *soft power* politik Korea Selatan (Hifzillah, 2014).

Upaya Korea Selatan terhadap kesetaraan gender melalui *soft power* mencerminkan upaya negara untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan baik di dalam maupun luar negeri. Melalui *Korean Wave* sering kali konten-konten yang dibuat menampilkan karakter perempuan yang kuat dan memberikan contoh positif kepada penontonnya. Korea Selatan juga termasuk negara yang aktif pada forum internasional PBB untuk membahas isu-isu kesetaraan gender melalui pertemuan UN-ESCAP pada tahun 2005 melanjutkan pembahasan mengenai pertemuan *The Beijing Platform for Action (1995)* sebuah konferensi yang diselenggarakan dalam rangka melaksanakan kesepakatan dari negara-negara PBB terkait konvensi *Convention on Elimination of All Forms Discriminations Againsts Women* pada tahun 1995 di Beijing. Korea Selatan berfokus pada bagian-bagian berikut dengan kepentingan atau prioritas tertentu, yaitu mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan, perempuan dan ekonomi, kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia perempuan, dan perempuan dan media (ESCAP, 2005).

Kebijakan *soft power* Korea Selatan terhadap kesetaraan gender menunjukkan komitmen negara untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan secara domestik maupun internasional. Melalui upaya pendidikan, nilai budaya, dan program pemberdayaan terus menjadi bagian integral strategi negara dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.



Namun, di tengah upaya ini, muncul tantangan dari kebijakan domestik yang cenderung mengurangi fokus pada isu gender, seperti penghapusan kuota gender dalam pemerintah oleh Yoon Seok Yeol, yang dapat menghambat representasi perempuan diposisi kepemimpinan ([Stangarone, 2019](#)).

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga ini bertugas menetapkan kebijakan keluarga yang terintegrasi dan melaksanakan tugas fungsi mengkoordinasikan dan mendukung kebijakan keluarga dari kementerian lainnya. Pada tahun 2008 fungsi kebijakan dan keluarga dan pengasuhan anak dialihkan ke Kementerian Kesejahteraan dan Urusan Keluarga, untuk itu fokus tugas Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga adalah terkait dengan kebijakan perempuan dan hak serta kepentingan perempuan. Kementerian ini juga berperan penting dalam mengadvokasi isu-isu kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi secara menyeluruh (ESCAP, 2005).

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga berupaya menciptakan masyarakat yang aman dan bahagia bagi semua kalangan baik perempuan, laki-laki, remaja, dan keluarga. Memfokuskan upaya untuk menciptakan masyarakat yang aman sehingga perempuan dan remaja dapat hidup dalam damai dan menciptakan peluang lingkup publik kepada semua gender. Dengan kebijakan yang inklusif, kementerian ini berusaha memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, tanpa memandang jenis kelamin (Uk, 2007). Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga menerapkan kebijakan kesetaraan gender dengan menciptakan undang-undang dan sistem yang memungkinkan laki-laki dan perempuan menikmati hak serta manfaat yang sama, khususnya dalam lingkungan publik. Wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang kompleks, termasuk tradisi patriarki dan perkembangan gerakan feminisme yang memicu munculnya sentimen anti-feminisme. Sebagaimana didefinisikan dalam teori feminisme liberal, manusia adalah makhluk otonom yang dipimpin oleh akal, di mana melalui akal manusia mampu memahami prinsip-prinsip moralitas dan asan individu. Prinsip-prinsip ini juga menjamin hak-hak individu. nterian Kesetaraan Gender dan Keluarga berupaya memastikan bahwa



setiap individu tidak dibatasi oleh gender dalam memperoleh kebebasan di berbagai aspek kehidupan.

Ketidakpastian mengenai masa depan kesetaraan gender di Korea Selatan memunculkan banyak perdebatan mengenai permasalahan ini yang banyak dibahas menjadi topik utama khususnya di media sosial. Generasi muda yang sangat aktif di media sosial berdiskusi mengenai isu-isu gender dan berbagai pengalaman pribadi terkait diskriminasi. Ini menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat modern (Costrani & Burhan).

Isu ini semakin memanas pada tahun 2022 Korea Selatan melakukan pemilihan umum untuk pemimpin negara yang akan menggantikan Presiden ke 19 yang sebelumnya telah menjabat selama lima tahun yaitu presiden Moon Jae In. Terdapat dua kandidat kuat yang dicalonkan pada pemilihan umum tahun 2022 yaitu Yoon Seok Yeol yang merupakan kandidat dari partai *Conservative People Power* dan Lee Jae Myung kandidat dari partai *People's Democratic* Yoon Seok Yeol sendiri merupakan pendatang baru dalam dunia politik, Ia merupakan jaksa agung selama 27 tahun dan jaksa agung yang berhasil membongkar kasus korupsi mantan Presiden Korea Selatan yaitu Park Geun Hye (Yoonjung, 2022).

Lee Jae-myung adalah seorang politikus Korea Selatan yang menjabat sebagai anggota majelis nasional dan pemimpin partai demokrat Korea. Lee merupakan calon dari partai demokrat pada pemilihan presiden Korea Selatan tahun 2022. Ia merupakan Gubernur Provinsi Gyeonggi ke-35 dari tahun 2018 hingga 2021 (EduRank, 2023).

Pada masa kampanye isu yang sangat kencang disuarakan adalah mengenai isu feminisme dimana hal ini merupakan isu yang cukup sering dibahas di Korea Selatan. Kedua kandidat menyuarakan mengenai isu ini dan memiliki pendapat yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Yoon Seok Yeol dikenal dengan retorika anti-feminismenya, termasuk rencananya untuk membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dan menyalahkan gerakan feminisme atas rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan.



Yoon Seok Yeol dianggap memiliki sifat yang konservatif dan kontroversial terutama dengan kebijakan anti feminisme yang diserukannya. Oleh karena hal itu Yoon Seok Yeol diberikan julukan Donald Trump versi Asia. Yoon Seok Yeol

melakukan penolakan terhadap feminisme dan memiliki wacana untuk menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga yang dianggap hanya menghabiskan anggaran negara secara percuma ([Martin & Yoon, 2022](#)).

**Gambar 1. Yoon Seok Yeol Presiden Korea Selatan periode 2022-2027**



Sumber : [bbc.com](#)

Lee Jae Myung mencoba memberikan nada yang lebih seimbang. Ia mengatakan diskriminasi terhadap laki-laki adalah sebuah kesalahan dan berjanji akan menutup kesenjangan upah berdasarkan gender. Dia mengatakan akan mempertahankan pelayanan gender tetapi mengubah nama Koreanya sehingga tidak lagi menggunakan kata “perempuan”. Dalam pernyataannya kepada CNN perwakilan Lee Jae Myung mengatakan telah menciptakan banyak kebijakan terkait gender yaitu kuota perempuan untuk memegang setidaknya 30% dalam jabatan publik (Yoonjung & Hollingsworth, 2022).

**Gambar 2. Lee Jae Myung Kandidat Presiden Partai *People's Democratic***



Sumber: [edurank.org](#)



Pada 9 Maret 2022 Yoon Seok Yeol yang merupakan kandidat Presiden dari partai *Conservative People Power* memenangkan pemilihan dengan total jumlah suara sebesar 48.56% dari pesaingnya yaitu Lee Jae Myung yang merupakan kandidat dari partai *People's Democratic* yang memperoleh suara sebanyak 47.83%. Kemenangan Yoon Seok Yeol ini mencerminkan dukungan yang signifikan dari pemilih muda, terutama pria, yang merasa terwakili oleh pandangan isu-isu gender dan kebijakan konservatifnya. Perbedaan pandangan antara kedua kandidat mengenai feminisme dan kesetaraan gender menjadi salah satu faktor utama dalam kampanye ini ([Johee, 2022](#)).

Selama kampanye, Yoon Seok Yeol mendekati para pemuda yang banyak diantaranya menentang feminisme. Yoon Seok Yeol mengatakan “tidak ada diskriminasi struktural” terhadap perempuan, meskipun Korea Selatan berada di peringkat terbawah dalam peringkat kesetaraan gender di negara-negara maju. Pernyataan ini mencerminkan pandangan kontroversialnya yang berusaha menarik dukungan dari kalangan muda yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pro kesetaraan gender sebelumnya (Gallo, 2022).

Terpilihnya Yoon Seok Yeol sebagai Presiden ke-20 Korea Selatan menjadi awal dari semakin berkembangnya isu sosial mengenai feminisme. Wacananya terkait rencana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga menimbulkan kekhawatiran di kalangan perempuan mengenai permasalahan sosial yang mungkin muncul di Korea Selatan. Situasi ini menciptakan ketegangan antara harapan untuk kemajuan sosial dan kekhawatiran akan kemunduran hak-hak perempuan. Meskipun kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari retorika politik, kaum perempuan di Korea Selatan tetap merasa khawatir akan dampak yang ditimbulkannya.

Korea Selatan sebagai negara maju tidak luput dari permasalahan internal mengenai kesetaraan gender dimana Korea Selatan memiliki presentase permasalahan pelecehan seksual yang cukup tinggi yaitu 98% pelaku penyerangan adalah laki-laki dan 86% korban adalah perempuan dengan tingkat pelaporan tiga sampai empat kasus setiap jamnya. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, angka-angka ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi isu serius yang ditangani secara efektif. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang dialami korban pelecehan, yang sering kali merasa tertekan untuk tidak



melaporkan kejadian tersebut karena takut akan stigma atau konsekuensi negatif (Hutabarat et al., 2023).

Permasalahan ini semakin meningkat secara kuantitas yang membuat Yoon Seok Yeol berjanji akan menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dan menyalahkan kebangkitan feminisme di Korea Selatan sebagai penyebab rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan dan ini merupakan salah satu catatan terburuk mengenai hak-hak perempuan di negara maju. Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga sebagian besar menyediakan layanan berbasis keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk anak-anak dan menghabiskan 0,2% anggaran tahunan negara, kurang dari 3% di antaranya digunakan untuk mendorong kesetaraan bagi perempuan (Bicker, 2022).

Penganut anti feminisme menyatakan bahwa upaya negara untuk mengatasi kesetaraan gender telah terlalu berpihak pada perempuan. Sedangkan itu, kaum feminis menunjuk pada kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang meluas di Korea Selatan masih banyak terjadi hingga saat ini bukan solusi mengatasi kejahatan seksual yang semakin meningkat tetapi Yoon Seok Yeol juga berencana akan mengubah hukuman bagi orang yang melaporkan kejahatan seksual secara tidak benar. Tujuan didirikannya Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga pada 29 Januari tahun 2001 untuk merancang dan melaksanakan kebijakan terkait dengan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan masalah-masalah keluarga. Tetapi para penganut paham anti feminisme menunjuk pada statistik yang menunjukkan bahwa perempuan kini lebih banyak yang melanjutkan ke universitas dibandingkan laki-laki dan mengatakan bahwa wajib militer bagi laki-laki memberi perempuan keuntungan dalam pasar kerja begitu juga dengan krisis demografi yang dialami Korea Selatan saat ini (Yoonjung & Hollingsworth, 2022).

Rencana penghapusan kementerian ini membuat kaum perempuan khawatir akan kehilangan hak-haknya, baik hak suara di ruang publik maupun hak suara di ruang internal. Selama ini, tujuan dibentuknya Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga di Korea Selatan adalah untuk membantu ptakan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak. Namun, pandangan anti-feminisme berbeda. Mereka menganggap bahwa tujuan kementerian nya mendukung kaum perempuan untuk mendapatkan kedudukan yang



sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa hal tersebut menciptakan ketidakadilan bagi kaum laki-laki.

Di Korea Selatan terdapat beberapa peraturan yang dianggap memberatkan kaum laki-laki yang menyebabkan gerakan jenjang karir kaum laki-laki terhambat, salah satu peraturan yang dianggap berat adalah wajib militer yang harus dijalankan laki-laki dewasa selama kurang lebih dua tahun dan mengakibatkan harus berhentinya karir bersekolah dan karir pekerjaan pada saat masa menjalankan tugas tersebut. Praktik wajib militer di Korea Selatan secara umum telah berlangsung selama berabad-abad, sejak Dinasti Goryeo pada awal milenium kedua. Namun undang-undang tersebut baru menjadi undang-undang resmi pada Tahun 1910 sebagai respons terhadap invasi dan pendudukan Jepang di Semenanjung Korea. Undang-undang wajib militer modern yang berlaku pada saat ini diamanatkan oleh Konstitusi Republik Korea yang ditetapkan pada Tahun 1948 dalam Bab II, Pasal 39 (1) "Semua warga mempunyai kewajiban pertahanan negara menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang" (Moon, 1998).

Hal inilah yang dianggap memberatkan kaum laki-laki untuk dapat bergerak secara konsisten untuk mengembangkan karirnya. Menurut kaum laki-laki ketidakadilan yang amat sangat signifikan dengan masih adanya ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban laki-laki di Korea Selatan untuk menjalani wajib militer di masa periode umur 18-30 tahun, di periode umur ini merupakan masa umur produktif laki-laki dalam merintis jenjang karirnya, oleh karena itu dengan ketentuan wajib militer yang masih berlaku sampai saat ini dianggap menjadi penghambat kaum laki-laki untuk terus secara berjenjang dalam merintis karirnya. Sementara itu, kaum perempuan masih akan terus dapat melanjutkan jenjang karirnya tanpa harus menjalankan kewajiban militer tersebut. Mereka melihat fenomena umum yang ada di kala itu adalah ketimpangan menjadi pusat perhatian dan mereka menawarkan suatu cara menanggulangi ketimpangan tersebut (Aminah, 2012a, 2012b).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis persepsi generasi muda khususnya generasi muda masyarakat Korea Selatan yang berusia diatas 18-40 tahun mengenai keadaan Korea

in setelah terpilihnya Yoon Seok Yeol menjadi presiden Korea Selatan, snya wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan rga yang diserukannya pada masa kampanye. Kajian utama dipusatkan



pada analisis persepsi generasi muda yang mengenai wacana dan juga dampak dari persepsi yang akan dialami jika wacana penghapusan Kementerian tersebut terealisasikan dalam masa jabatan Yoon Seok Yeol lima tahun mendatang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi generasi muda Korea Selatan terhadap wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi?
3. Dampak persepsi generasi muda terhadap kebijakan pemerintah Korea Selatan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memaparkan persepsi generasi muda Korea Selatan mengenai wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.
3. Mengidentifikasi implikasi persepsi generasi muda Korea Selatan terhadap kebijakan pemerintah terhadap publik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk referensi secara akademisi untuk penelitian lebih lanjut terkait isu-isu kesetaraan gender dan kebijakan publik di Korea Selatan maupun negara lainnya dan melihat bagaimana keadaan diskriminasi gender yang terjadi di negara maju seperti Korea Selatan masih menjadi isu besar yang masih terjadi dimasa sekarang ini dan persepsi generasi muda mengenai wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga oleh presiden Yoon Seok Yeol. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana dalam menambah wawasan keilmuan dan penghayatan dikalangan masyarakat dalam mengembangkan pemahaman ilmu



pengetahuan tentang Budaya dan Gender yang dikhususkan kajiannya pada aspek kesenjangan gender.

## 2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan manfaat untuk pemahaman dan wawasan bagi pemerintah atau masyarakat, serta pembuat kebijakan mengenai pandangan generasi muda terkait kesetaraan gender dan memberikan informasi bagi pembaca dalam pemahaman feminisme dalam lingkungan sosial dan memahami isu-isu kesenjangan gender di negara maju.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Relevan

Persepsi yang digambarkan melalui wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga kearah faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi persepsi generasi muda dan apakah persepsi ini akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar atau bahkan pada kebijakan pemerintah, kajian mengenai persepsi generasi muda bukanlah hal baru, tetapi penelitian mengenai persepsi generasi muda terkait wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga di Korea Selatan masih terbilang sedikit, beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai persepsi generasi muda dan hal-hal terkait kesetaraan gender. Dalam penyusunan tesis ini, selain merujuk pada teori-teori atau pendapat para ahli, penulis juga meninjau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan persepsi dan permasalahan kesetaraan gender.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Azalia Zahra Hazairin, Nindy Shabina Kandi, dan Mohamad Alvin Lukman Hadi dalam jurnalnya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap Kesetaraan Gender dan dalam penelitian tersebut bagaimana mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan mengenai permasalahan sosial yang muncul dari kesetaraan gender, bagaimana perbedaan itu dapat menjadi masalah di masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi pria maupun wanita. Istilah gender mengacu pada makna sosial, budaya, dan biologis. Kesimpulan yang diambil pada penelitian di dalam jurnal ini adalah mahasiswa memiliki keinginan untuk mewujudkan kesetaraan gender lewat hal-hal yang akan mereka lakukan untuk mendorong kesetaraan gender dan menghilangkan budaya patriarki yang masih tertanam dalam pandangan atau persepsi seseorang (Hazairin et al., 2023).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yunsoo Lee dalam jurnalnya yang berjudul *Gender Equity and Trust in Government: Evidence South Korea*.

Penelitian ini menganalisa untuk mengidentifikasi sejauh mana kesetaraan gender mempengaruhi kepercayaan pemerintah. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender rendah di Korea Selatan, menurut



teori kontrak psikologis dan demokratis karena ketidaksetaraan gender mempertanyakan kapasitas pemerintah. Ketika warga negara merasakan rendahnya tingkat kesetaraan gender, mereka cenderung tidak percaya pada pemerintah. Hasil survei sosial umum pada penelitian ini adalah kesetaraan gender berdampak positif pada kepada kepercayaan pemerintah, kesetaraan gender memiliki efek yang lebih besar pada kepercayaan warga negara perempuan dari pada laki-laki, dan kesetaraan gender lebih kuat terkait dengan kepercayaan pada Mahkamah Agung daripada kementerian lainnya (Lee, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatu Rosyida dalam jurnal yang berjudul *Upaya Korea Women's Association United dalam memperjuangkan Kesetaraan Gender di ranah politik Korea Selatan*. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian mengenai sebuah organisasi pemberdayaan perempuan dalam menyuarkan kedudukannya di ranah politik di Korea Selatan. Rendahnya kesetaraan gender terutama dalam ranah politik menjadikan Korea Selatan menduduki ke-107 dari 156 negara perihal keterwakilan perempuan di parlemen. Hal itu memicu para perempuan termasuk *civil society* seperti *Korea Women's Association United (KWAU)* untuk berani bergerak demi memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KWAU untuk mencapai tujuannya (Kumalasari & Rosyida, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soh Chung Hee dalam jurnalnya yang berjudul *Sexual Equality, Male Superiority, and Korean Women in Politics: Changing Gender Relations in a "Patriarchal Democracy"*. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa proses perubahan sosial dalam hubungan gender dengan memeriksa pola organisasi tindakan sosial individu dalam interaksi laki-laki dan perempuan di Korea Selatan. Fokusnya penelitian ini pada pengalaman perempuan dalam dunia politik. Struktural sosial yang demokratis telah diartikulasikan dalam konstitusi Republik Korea telah melegitimasi dan telah membantu memperluas cakupan partisipasi dalam kehidupan publik, namun ideologi tradisional tentang superioritas laki-laki dan asaan spesialisasi peran gender yang didasarkan pada struktur patriarki usianisme terus memberikan pengaruh yang kuat dalam hubungan ler. Hasil analisa dari penelitian ini adalah menunjukkan pola hubungan



gender yang muncul dalam masyarakat Korea Selatan adalah skema gender yang terkotak-kotak yang cair dan ditentukan secara situasional oleh kebijaksanaan dan pengetahuan individu (Soh, 1993).

## 2.2 Landasan Teori

### 2.1.1 Teori Persepsi

Penelitian ini menggunakan pendekatan persepsi, menurut Rahmat (1990:64) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek yang diterima atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (Fahmi, 2020)

Philip Kotler memberikan definisi persepsi sebagai proses individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti (Kotler & Keller, 2009).

Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut, sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan (Laurens, 2004).

Persepsi sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu *External Perception* adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu, dan *Self Perception* adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu (Sunaryo & Kes, 2004).

Persepsi juga dapat terpengaruh sosial, definisi persepsi sosial menurut Harvey dan Smith seperti dikutip Widyastuti dalam buku psikologi sosial, yaitu suatu proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut. Serta menurut Verdeber persepsi sosial adalah suatu pesan melekatkan atau memberikan makna kepada informasi sensori yang diterima seseorang (Widyastuti, 2014).

Persepsi pun dapat dipengaruhi oleh budaya, karena setiap individu memiliki penafsiran sesuatu berdasarkan ideologi, agama, latar belakang dan ras, hal-hal ini akan mempengaruhi individu dalam menghasilkan epsi kepada realitas, maka persepsi seseorang lingkungannya bersifat



subjektif, semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap suatu realitas dan oleh karena itu tidak ada dua orang yang mempunyai nilai-nilai budaya yang persis sama, maka tidak pernah ada dua orang mempunyai persepsi sama pula (Sarwono, 2010).

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi menurut Robert Gifford dalam (Ariyanti, 2005) oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Personal Effect* dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.
- b. *Physical Effect* kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal, dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya
- c. *Cultural Effect* Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam melihat dunia. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

Persepsi juga dapat terpengaruh dari lingkungan sekitar, dimana seseorang tidak bisa hanya melihat dari sudut pandangnya tetapi juga ada sudut pandang lain yang berbeda dalam melihat suatu objek dan hal itu juga sarkan atas pengalaman dan latar belakang individu. Dari semua definisi di atas, persepsi dapat dihasilkan dari faktor internal dan eksternal orang, dari faktor lingkungan hingga perbedaan budaya pun dapat



mempengaruhi persepsi seseorang dan disimpulkan bahwa setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda tergantung pada faktor internal dan eksternal dari seseorang tersebut, baik dari lingkungan sosial maupun lingkungan budaya dapat mempengaruhi perbedaan persepsi setiap orang terhadap realitas atau hal yang sama.

Dampak setelah terbentuknya persepsi menurut George C. Edwards III mencakup sikap positif atau negatif yang dimiliki masyarakat dan merupakan bentuk proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan terhadap hasil dari kebijakan tersebut (Edwards III et al., 1997).

### 2.1.3 Feminisme

Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft *The Vindication of the Rights of Woman* (1792) hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad kedua puluh Sanders (Suwastini, 2013). Feminisme merupakan teori tentang persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki di bidang politik, ekonomi, sosial, publik, atau keinginan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan (Sastriyani, 2007). Feminisme muncul pada abad 18 dan dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perempuan sepanjang sejarahnya mengalami marginalisasi dan perlakuan sewenang-wenang. Feminisme terbagi atas beberapa aliran, antara lain ialah feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis dan feminisme sosialis (Ikki et al., 2021).

Gerakan feminisme awal merupakan sebagai usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550- 1700 di Inggris (Hodgson-Wright, 2004). Fokus perjuangan feminisme awal adalah melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional dan tidak rasional (Jenainati & Groves, 2008).

Menurut Sanders (2006), feminisme gelombang pertama mencakup beberapa ambivalensi. Para feminis gelombang pertama sangat berhati-hati agar tidak terlibat kehidupan yang tidak konvensional. Mungkin ada kaitannya dengan backlash yang dialami pasca biografi Mary Wollstonecraft (Kirkham, 1997).



Feminisme Liberal adalah bahwa manusia adalah otonom yang dipimpin oleh akal dan dengan akal manusia mampu untuk memahami prinsip-prinsip moralitas, kebebasan individu. Prinsip-prinsip ini juga menjamin hak-hak individu. Isu utamanya adalah akses pendidikan kebijakan negara yang bias gender, hak-hak sipil, dan politik (Sulasmi, 2021). Ahli-ahli teori feminisme liberal adalah Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill & Harriet Mill, Betty Friedan (Arivia, 2006).

Feminisme Liberal John Stuart Mill mengungkapkan prinsip-prinsip yang dia kemukakan memiliki implikasi yang relevan bagi feminisme liberal. Prinsip kebebasan individu yang ditekankan oleh Mill mencakup semua anggota masyarakat, termasuk perempuan. Oleh karena itu, dari sudut pandang feminisme liberal, perempuan memiliki hak yang sama untuk kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengatur kehidupan mereka sendiri. Pendekatan feminisme liberal yang dianut oleh Harriet Mill, seperti halnya suaminya John Stuart Mill, menekankan pentingnya kebebasan individu dan persamaan hak bagi perempuan. Mereka berargumen bahwa pembebasan perempuan akan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan berusaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang membatasi potensi dan kesempatan perempuan. Ia berjuang untuk kebebasan perempuan, kesetaraan gender, dan penghapusan diskriminasi berbasis gender. Harriet Mill mendorong inklusi perempuan dalam kehidupan politik, hak-hak perempuan dalam masyarakat, dan pendidikan yang setara untuk perempuan (Mill, 2005).

Feminisme radikal Kate Millet menyatakan bahwa akar opresi terhadap perempuan sudah terkubur dalam sistem seks pada budaya patriarki. Millet berpendapat dalam bukunya *Sexual Politic* (1970), bahwa seks adalah politisi, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan kekuasaan. Idiologi patriarkal menurut Millet membesarkan-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki selalu mempunyai peran yang dominan dari pada perempuan (Simanjuntak, 2018).

Feminisme radikal berpandangan bahwa feminis perlu meruntuhkan atau secara radikal memperbaiki keluarga dan menciptakan budaya non-misoginis di mana perempuan tidak dijadikan objek. Feminisme radikal cenderung menempatkan lebih banyak perhatian pada



ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Feminisme radikal menyalahkan dilema perempuan dalam patriarki yang mereka yakini berasal dari keluarga dan cara di mana perempuan terjebak dalam peran tanggung jawab dan kewajiban mereka (Agger, 2003).

Menurut Elizabeth feminisme sosialis terungkap dalam dua teori yang dikembangkan perspektif ini yaitu teori sistem ganda dan teori sistem menyatu, Teori sistem ganda memandang persoalan penindasan kaum wanita dari dua ideologi yang berbeda yaitu kapitalisme dan patriarki. Sedangkan teori sistem menyatu adalah gabungan dari berbagai konsep mengenai apa yang menyebabkan penindasan terhadap kaum wanita di masyarakat Tong, 1998:20 (dalam Ikki et al., 2021).

Kaum feminisme sosialis berpandangan bahwa “tidak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan dan tidak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme”. Paham tersebut telah mengidentikkan sosialisme dan pembebasan perempuan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan (Ihromi & Indonesia, 1995).

Menurut Hee Jeong Sohn dalam kajiannya feminisme *reboot* (menyalakan ulang) gerakan feminisme ini muncul sebagai gelombang global neoliberalisme, munculnya teknologi digital yang menghubungkan dunia dengan kecepatan dan cakupan yang luar biasa, semakin besarnya kesadaran global para pengguna teknologi digital dan perubahan yang mereka buat dalam lanskap politik berbagai masyarakat bersinggungan dengan persamaan dan perbedaan. Baik perempuan maupun patriarki tidak menjadi kategori dan konsep yang homogen, dan untuk memahami gerakan feminis, kita perlu mengakui perbedaan dan keragaman di antara perempuan dan menempatkan pengalaman perempuan dalam konteks dan politik spesifik mereka (Seo & Choi, 2020).

### 2.1.3 Patriarki Konfusianisme



Patriarki konfusianisme adalah ideologi tradisional yang dianut masyarakat Korea Selatan hingga saat ini, ideologi ini merupakan budaya mana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan.

Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Budaya patriarki secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (Israpil, 2017).

Ketidakseimbangan gender dalam angkatan kerja dapat dihubungkan dengan konteks sejarah dan sosial yang terjadi di Korea Selatan, terutama warisan konfusianisme yang sudah membuat tempat kerja menjadi maskulin dan membatasi posisi akses perempuan dalam hal pekerjaan (Kim, 1994).

Ajaran konfusianisme mendukung perempuan untuk hanya terlibat pada pekerjaan domestik dan berdiam diri di rumah, fokus berperan sebagai seorang istri dan ibu, juga kebijakan subordinasi lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana patriarki menjadi tema besar dari ajaran konfusianisme, dimana tiap gender dianggap memiliki peran masing-masing dalam kehidupan berkeluarga, diberikan peringkat berdasarkan usia mereka, dan setiap jenis kelamin memiliki peran sosialnya sesuai dengan harapan yang dibentuk masyarakat. Walaupun di era modern ajaran konfusianisme telah memudar di Korea Selatan, tetapi mentalitas peran gender masih bertahan, dimana laki-laki menerima perlakuan dan kesempatan yang lebih baik daripada perempuan (Aanchal et al., 2018).

### 2.3 Kerangka Teoritis

Penelitian ini dimulai dengan pertanyaan tentang rencana Presiden Yoon Seok Yeol untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Pertanyaan ini kemudian dibagi menjadi tiga variabel: persepsi tentang wacana, faktor-faktor yang membentuk persepsi, dan dampak dari persepsi tersebut.

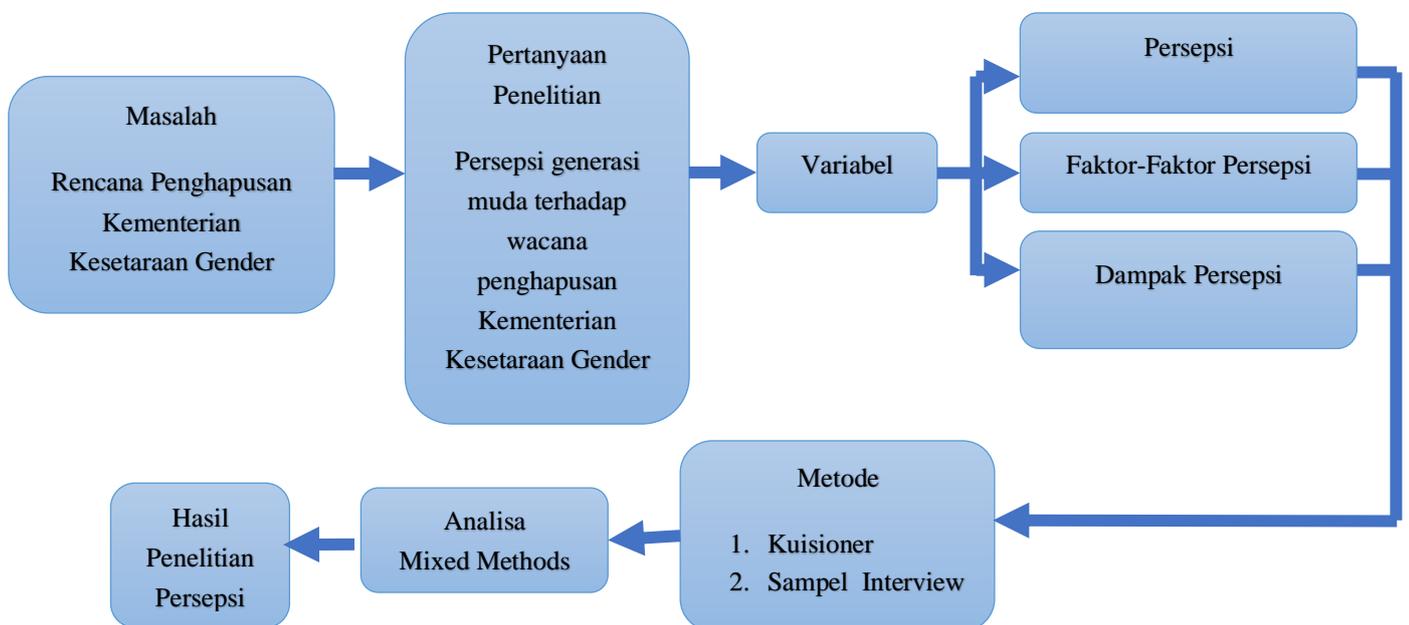
Instrumen yang digunakan terdiri dari kuisioner dan *sampling interview*, kuisioner digunakan untuk mengukur melalui skala likert berapa hasil atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden dan *sampling interview* digunakan untuk mendukung data dari kuisioner dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan-informan.



Setelah semua data yang diperlukan untuk analisis dikumpulkan, data diolah secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil kuantitatif ditampilkan dalam bentuk angka menggunakan metode spss dan excel, sedangkan hasil kualitatif didukung oleh metode deskriptif dan interpretasi dari temuan wawancara.

Hasil pengolahan data ini akan dimasukkan ke dalam kesimpulan. Kesimpulan ini akan menjelaskan hasil mana yang paling dominan dan mengapa mereka lebih dominan daripada hasil lainnya.

kerangka dapat dipahami melalui gambar berikut:





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)